

Minoritas Muslim:

Belajar dari Kasus Minoritas Muslim di Filipina

Pendahuluan

Salah satu rintangan yang paling serius dalam mengembangkan pemahaman sistematis tentang Islam di Asia Tenggara adalah fakta bahwa topik tersebut telah lama sekali terpinggirkan dalam lapangan studi Islam dan studi Asia Tenggara. Fakta tersebut dikarenakan dalam studi Islam, para sarjana Barat dan Timur Tengah sama-sama berkecenderungan menempatkan Asia Tenggara di pinggiran dalam arus intelektual di dunia Islam. Dalam beberapa tulisan tentang sejarah dan peradaban Islam, Asia Tenggara hanya dibahas sekilas, atau bahkan tidak sama sekali. Padahal kenyataannya, Asia Tenggara memiliki hampir 200 juta muslim, para pengamat, bahkan beberapa intelektual tidak terbiasa mengidentifikasi Islam Asia Tenggara dengan Islam di Timur Tengah dan menganggap Asia Tenggara secara intelektual dan institusional sebagai pengembangan Islam dari Timur Tengah.¹ Memang, secara geografis, kawasan Asia Tenggara terletak jauh dari wilayah Timur Tengah, yang secara konvensional dalam pikiran sarjana Barat, Timur Tengah sering diasosiasikan dengan Islam. Ironisnya, banyak kaum muslim Timur Tengah yang tidak cukup akrab dengan Asia Tenggara karena bagi Muslim Timur Tengah, kawasan Asia Tenggara dianggap bukan sebagai pengikut murni dari ajaran Islam yang benar. Warna Islam di Asia Tenggara telah terkontaminasi dengan budaya setempat. Meskipun demikian, realitanya, Asia Tenggara sesungguhnya merupakan sebuah rumah bagi kawasan penduduk muslim terpadat

Oleh : Rina Rehayati

Minoritas adalah kelompok orang yang sejarahnya tidak tertulis, kondisi keberadaannya tidak dikenal, cita-cita dan aspirasinya tidak diapresiasi. Mereka orang-orang al-Mustadl'afin fi al-ardl (kaum tertindas di muka bumi). Filipina Selatan salah satu kategori minoritas muslim yang dikenal dengan nama Bangsa Moro. Mereka berjuang menentang kolonialisme untuk melindungi integritas teritorial dan independensi mereka. Wilayah minoritas muslim biasanya menggunakan istilah da'ar al-Islam, lawan kata dari da'ar al-harb. Untuk konteks saat ini, perlu dikembangkan istilah da'ar al-da'wah, suatu istilah untuk mengacu kepada situasi tatkala Rasulullah saw berada Mekkah. Pada masa itu Rasulullah bersama Sahabat dan kaumnya hidup sebagai minoritas dan dituntut untuk mempersaksikan keyakinan agama mereka (Islam) kepada masyarakat kafir Mekkah. Konsistensi sikap antara keyakinan, perkataan dan perbuatan membawa kesuksesan bagi umat Islam. Akhirnya, mereka diterima oleh masyarakat Mekkah, bahkan terjadi perubahan perubahan sosial, mereka yang semula minoritas berubah menjadi mayoritas.

Keyword : Minoritas, Mayoritas, Moro

di dunia, terutama di Indonesia.²

Muslim di Asia Tenggara merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian Islam secara universal. Namun, kajian Islam di Asia Tenggara masih belum begitu gencar

sebagaimana Islam di belahan dunia lain, seperti Islam di Arab, Islam di Amerika atau Islam di Eropa. Dalam melakukan studi Islam, para intelektual Barat dan intelektual Timur Tengah cenderung meletakkan Asia Tenggara sebagai kajian pinggiran, bukan sesuatu topik yang menarik untuk dikembangkan dalam arus intelektual dunia Islam. Meskipun ada, belum begitu banyak. Secara geografis, letak Asia Tenggara sangat jauh dari Timur Tengah, sehingga tidak tersentuh oleh para intelektual Arab dan Barat.

Masyarakat Asia Tenggara juga dikenal sebagai muslim Melayu. Menurut Azyumardi Azra, Asia Tenggara dapat dikategorikan sebagai wilayah kebudayaan yang cukup berpengaruh dari tujuh wilayah kebudayaan yang ada di dunia. Tujuh wilayah kebudayaan Islam tersebut adalah: *pertama*, wilayah kebudayaan Arab yang mencakup semenanjung Arabia dan daerah-daerah Madrid, Afrika Utara dan sebagainya. *Kedua*, wilayah Persia, Iran dan sebagian wilayah Asia Tengah yang dalam unsur bahasa dan kebudayaannya dipengaruhi oleh bahasa dan kebudayaan Persia. *Ketiga*, wilayah kekuasaan Islam Turki dengan beberapa wilayah strategis di Eropa Timur, seperti: Bosnia, Kosovo, dan sekitarnya. *Keempat*, wilayah kebudayaan Islam Indo-Pakistan, India dan Bangladesh. *Kelima*, wilayah kebudayaan Afrikanistan yang mencakup wilayah Madrid (Spanyol), Praha, Nigeria dan sebagainya. *Keenam*, wilayah kebudayaan Islam-Melayu. *Ketujuh*, wilayah kekuasaan Islam di dunia Barat.³

Filipina adalah salah satu wilayah di Asia Tenggara yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam-Melayu, mengingat letak negaranya yang dekat dengan Malaysia, Singapura dan Indonesia. Berbeda dengan Malaysia dan Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, di Filipina justru sebaliknya. Terbentuknya minoritas muslim

di Filipina karena hanya sebagian kecil penduduknya menganut agama Islam (10 %), itu pun di wilayah tertentu dan dianggap zona berbahaya oleh pemerintah Filipina.

Dalam membahas minoritas muslim di Asia Tenggara yang terdapat di Filipina, penulis terlebih dahulu melakukan pendefinisian dan pemetaan minoritas muslim, tujuannya untuk memudahkan pengkategorian minoritas muslim yang ada di beberapa negara, sehingga bisa mengidentifikasi minoritas muslim yang terdapat di Filipina. Penulis merasa perlu mengangkat tulisan tentang minoritas muslim dalam kajian ilmiah dengan alasan: *pertama*, populasi umat Islam cukup besar. Umat Islam yang hidup sebagai minoritas sekitar ¼ dari jumlah muslim, negara dimana umat Islam hidup sebagai minoritas seperti: AS, India, Inggris, Perancis, Jerman, Israel dan Asia Tenggara. Jumlah Umat Islam dunia mencapai 1 miliar orang. Jumlah minoritas muslim 290 juta orang. *Kedua*, Adanya ketidakadilan dan kebrutalan kaum mayoritas kepada muslim yang berjuang untuk martabat diri dan identitas mereka. *Ketiga*, karena pengertian tentang *ummah*. Menimbulkan keprihatinan pada negara-negara tetangga, seperti perjuangan Kashmir di Asia Selatan, Palestina di Timur Tengah telah menyedot perhatian pada muslim dunia.⁴ Dari ketiga alasan di atas, secara akademis, bagi penulis alasan pertama lebih menarik perhatian, mengingat populasi umat Islam yang cukup besar, tetapi tidak dominan dalam pergulatan keilmuan di dunia Islam dan dunia Barat.

Kegelisahan Akademik

Dari segi konsep, minoritas muslim perlu didudukkan secara jernih, apakah ia merujuk pada jumlah kuantitatif atau hanya pada atribut-atribut tertentu yang melekat pada mereka, dan menjadikan mereka

dianggap berbeda dari penduduk mayoritas. Pada kasus Filipina, beberapa kali penulis mendengar pernyataan dari teman sesama dosen: “Jika umat Islam mayoritas, maka yang selalu dituntut oleh dunia adalah bagaimana mereka bisa bersikap toleran kepada penganut agama lain, menegakkan keadilan dan menciptakan harmoni dalam keragaman. Tapi, ketika umat Islam minoritas, maka perlakuan yang terjadi sebaliknya. Begitu banyak muslim minoritas yang menderita hidupnya di tengah-tengah mayoritas non-muslim. Perasaan ketidakadilan inilah yang menjadi pemicu munculnya kecurigaan, kebencian dan bahkan radikalisme pada sebagian umat Islam.” Meskipun demikian, tidak adil rasanya kalau kita menganggap seluruh umat muslim minoritas di dunia menderita. Tidak seluruh minoritas muslim diperlakukan tidak adil oleh mayoritas. Filipina hanyalah kasusistik, tidak bisa digeneralisir. Namun, dari kasus di Filipina, memang patut dipertanyakan, apakah minoritas muslim di sana bermasalah? Mengapa kelompok mayoritas non-muslim Filipina membenci minoritas muslim? Apa yang salah dengan keberadaan minoritas muslim Filipina? Pertanyaan sama tapi berbeda konteksnya, di tulis oleh Esposito ketika terjadi tragedi 11 September 2001: “Adakah benturan peradaban antara Islam dengan Barat? Kenapa mereka membenci kita, orang Amerika dan Barat pada umumnya? Pada tanggal itu merupakan Sinyal atas kemampuan para teroris melancarkan serangan dasyat terhadap target primer internasionalnya, yaitu Amerika Serikat, yang terjadi dikandangannya sendiri. Serangan 11 September membangkitkan kembali pertanyaan-pertanyaan lama yang menjadi penting lagi.⁵

Informasi tentang minoritas muslim menjadi penting guna meningkatkan kepekaan kaum mayoritas muslim, dalam

mengembangkan kesantunan dan kearifan mayoritas terhadap minoritas. Kesantunan dan kearifan tersebut pada gilirannya mendorong tumbuh suburnya demokrasi seperti: kebebasan sipil dan toleransi. Dan mengembangkan sikap positif pada mayoritas agar lebih sensitif dan menaruh simpati kepada komunitas minoritas.⁶ Dalam konteks ini perlu menjadi catatan bahwa menaruh simpati kepada komunitas minoritas tidak berarti menanam rasa dendam kepada komunitas mayoritas, melainkan mengasah rasa sensitivitas, menumbuhkan simpati dan ber-*empati* sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama umat Islam, atau sesama manusia.

Definisi Minoritas, Asal-usul Terbentuknya dan Pilihan Hidup bagi Komunitas Minoritas

a. Definisi

Ali Kettani mendefinisikan minoritas sebagai sekelompok orang yang karena satu dan lain hal menjadi korban pertama despotisme negara atau komunitas yang membentuk mayoritas. Mereka adalah orang yang sejarahnya tetap, tidak tertulis, kondisi keberadaannya tidak dikenal, cita-cita dan aspirasinya tidak diapresiasi. Mereka adalah orang-orang *al-Mustadh'afin fi al-ardl* (kaum tertindas di muka bumi).⁷ Mengikuti definisi Kettani, secara sederhana, seseorang atau sekelompok kaum muslim bisa dikategorikan sebagai minoritas sebagai berikut; *pertama*, soal jumlah kecil. Seseorang atau sekelompok orang dikatakan sebagai minoritas apabila “kalah jauh dalam hal jumlah” dalam posisi dibandingkan dengan kelompok pemeluk agama lain yang jumlahnya jauh lebih besar. Kettani mengelompokkan minoritas muslim

dalam konteks wadah negara-bangsa (*nation state*), bukan dalam wadah lain yang alami dalam masyarakat, misalnya etnisitas, kesukuan (*kabilah*), kebangsaan (*syah*) dan kelompok (*tha'ifah*). Dengan jumlah yang minoritas mereka kemudian mengalami berbagai masalah yang sesungguhnya tidak mereka harapkan, seperti termarginalisasi secara politik, kesulitan berintegrasi dalam negara-bangsa, secara sosio-kultural tersegregasi, terhimpit kesulitan ekonomi. Akhirnya, kaum minoritas muslim membangun dan memelihara konsep, identitas dan jati diri mereka sendiri.⁸

b. Asal-usul Terbentuknya minoritas

Suatu Negara yang penduduknya terdiri dari mayoritas muslim ternyata juga bisa menjadi minoritas karena dikuasai oleh non-muslim. Ada beberapa faktor penyebab mayoritas muslim terpaksa berada di bawah kekuasaan non-muslim: *pertama*, suatu komunitas mayoritas muslim dikondisikan tidak efektif pada aspek jumlah oleh non-muslim. Ketika pendudukan itu berlangsung cukup lama, mayoritas muslim di robah menjadi minoritas dalam jumlah dikarenakan pengusiran orang-orang muslim dalam skala besar dan imigrasi non-muslim. Dalam kategori inilah jatuhnya minoritas Uni Soviet, Palestina, Thailand, Ethiopia dan Bosnia Herzegovina di Yugoslavia. *Kedua*, ketika pemerintah muslim di suatu negeri tidak berlangsung cukup lama, atau usaha untuk menyebarkan Islam tidak cukup hebat dan efektif untuk mengubah muslim menjadi mayoritas dalam jumlah di negeri-negeri yang mereka kuasai. Begitu kekuasaan politiknya tumbang, orang-orang

muslim mendapati dirinya turun statusnya menjadi minoritas dalam negerinya sendiri. Kasus ini bisa dilihat pada umat Islam di India, Balkan dan Afrika. *Ketiga*, ketika sejumlah orang non-muslim di lingkungan non-muslim pindah agama menjadi muslim. Biasanya, arus imigran dan arus muslim *muallaf* menyatu bersama untuk membentuk suatu minoritas muslim yang beradaptasi dengan baik dengan budaya setempat dan masih terkait dengan *ummah* muslim. Contoh dari kasus semacam ini adalah komunitas muslim Sri Lanka yang sebenarnya merupakan gabungan antara imigran muslim dari Arabia Selatan dan muslim *muallaf* dari pulau itu. Namun, secara kultural muslim ini menggunakan bahasa Tamil yang juga digunakan oleh kaum muslim India Selatan, bukan bahasa Singhala.⁹ *Keempat*, terjadinya *migrasi* kewarganegaraan dari negara-negara muslim ke negara non-muslim, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Selain migrasi konversi agama juga menjadi faktor munculnya minoritas muslim, seperti: muslim di Amerika Serikat dan Korea. *Kelima*, terjadinya *ethnic religious cleansing*, yakni apa yang terjadi di Spanyol setelah ditundukkan oleh Kristen. Umat Islam dipecah sesuai dengan ras masing-masing dan selalu mendapat tekanan dari Kristen mayoritas.¹⁰

Dari faktor-faktor di atas, diketahui bahwa secara garis besar ada tiga pola terbentuknya minoritas muslim. *Pertama*, tanah-tanah muslim dikuasai oleh penjajah. *Kedua*, gerakan pindah agama dari non-muslim menjadi muslim. *Ketiga*, emigrasi muslim ke daerah-daerah yang berpenduduk muslimnya kecil. Muslim Afrika yang

termasuk dalam kelas masyarakat miskin dan hanya sedikit yang sekolah. Di Afrika Timur, muslim miskin ini menjadi sasaran penarikan missionaris Kristen.¹¹ Muslim Ethiopia di Afrika merupakan mayoritas, tetapi mereka hidup teraniaya. Penindasan terhadap sekolah Islam meluas, penggunaan bahasa Arab dihambat, para pemimpin muslim dianiaya dan diganggu. Sementara itu, Missionaris diberi keleluasaan untuk mengambil keuntungan dari kemiskinan muslim.¹² Ethiopia terdiri menjadi dua negara, muslim di Selatan, dengan ibu kotanya Harrar (sejak 1520), dan sebuah negara Kristen yang lebih kecil di Utara. Di pantai laut merah perebutan berjalan terus antara Kristen (Portugis) dan muslim (Usmani).¹³ Pada tataran praktek politik Barat, penggunaan istilah minoritas bagi pengelompokan sosial lazim dihubungkan dengan eksistensi identitas kolektif dan pembelaan hak-haknya. Istilah minoritas menurut konteks negara Barat jelas bisa merujuk pada eksistensi suatu minoritas kebangsaan dengan segala hak politiknya. Oleh karena itu, para politisi di Barat sangat peka terhadap sebutan minoritas muslim yang bisa pembebasan kewajiban, mengakui hak-hak minoritas kebangsaan yang bersangkutan. Apalagi pengorganisasian negara-negara Barat umumnya masih mengandalkan kepatuhan tunggal dari warganya yang homogen berkulit putih dengan menjunjung prinsip **rasionalitas politik** seperti berlaku di Perancis dan Jerman dan prinsip **konsensus politik** seperti di Inggris dan Kanada.¹⁴ Namun sayang, praktek politik Barat sampai sekarang masih mengalami kebuntuan nalar untuk mengakui keminoritasan

kebangsaan dalam suatu negara.¹⁵ Berbeda dengan Perancis, hubungan elite dengan komunitas muslim di Kanada berlangsung lebih baik. Sikap anti-semit dan Arab bukan merupakan isu politik. Demikian pula dengan kepekaan terhadap konsep *jihad* di kalangan elite dan masyarakat luas, juga tidak berlebihan, dalam artian tidak menjadi bahan perdebatan publik. Penggunaan ungkapan *stereotip* untuk sebutan komunitas muslim bukan merupakan kebiasaan.¹⁶ Kondisi objektif di dunia Barat ini, seharusnya juga diketahui dan dimaklumi oleh muslim militan atau muslim radikal.

c. Pilihan Hidup bagi Komunitas Minoritas: *Jihad* atau *Hijrah*?

Ada dilema yang dihadapi muslim minoritas yang tertindas di daerah-daerah tertentu: Apakah *hijrah* ke wilayah lain, atau *jihad* agar bisa memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, *hijrah* seringkali agak bermasalah, karena setiap masuknya sejumlah besar pengungsi menyebabkan timbulnya masalah sosial dan politik kepada masyarakat, tuan rumah. Sedangkan pilihan *jihad* juga sulit dilakukan saat ini. Inilah yang terjadi di Kashmir dan Palestina. Penindasan yang mereka alami seperti: kebrutalan tentara dan polisi, para perempuan ketakutan kehormatan dan martabat mereka dilanggar. Laki-laki muda ketakutan dijempit dan diinterogasi dan mengalami penyiksaan ketika memberi alasan yang lemah.¹⁷

Untuk mencapai idealita dari suatu negara yang homogen, pemerintah di sepanjang sejarah telah mengikuti beragam kebijakan mengenai minoritas kultural. Beberapa minoritas telah dihabiskan secara fisik, atau mengalami

pengusiran massal (pembersihan etnis).¹⁸ Minoritas lainnya dipaksa untuk berasimilasi, dipaksa untuk menerima bahasa, agama dan adat dari kaum mayoritas. Pada kasus lainnya, minoritas diperlakukan sebagai musuh yang menetap, yang dikenai segregasi fisik dan diskriminasi ekonomi, dan tidak memiliki hak-hak politik.¹⁹

Pengakuan harkat kemanusiaan terhadap minoritas selalu saja menjadi instrumen penguatan identitas kolektif negara. Begitu pula sebaliknya, politik identitas sering menjadi instrumen bagi penguatan posisi minoritas dalam permainan melawan mayoritas. Interaksi kedua kelompok tersebut menghasilkan kenyataan dimana minoritas etnis harus melakukan asimilasi dengan mayoritas, sedangkan mayoritas tidak harus berasimilasi dengan minoritas. Oleh karena itu, minoritas etnis masih belum bisa dipandang sebagai suatu kategori. Sekalipun pergerakan hak-hak sosial semakin marak. Pemberian kategori politik tersebut belum bisa diberikan.²⁰

Penderitaan minoritas muslim yang tertindas itulah yang membangkitkan semangat mujahid Afghan Arab sebagai bentuk solidaritas muslim dan mereka menyeru dan menyatukan muslim dari berbagai wilayah dunia ini untuk ikut serta dalam *jihad* di negara-negara muslim minoritas yang tertindas, seperti: Palestina, Bosnia, Kosovo, Kashmir, Asia Tengah dan Chechnya. Ada sejumlah kecil yang kemudian menjadi tentara sewaan (*mercenaries*) dalam upaya-upaya yang lebih radikal, bukan hanya dalam rangka membela kaum muslimin dari penindasan, tetapi untuk menggulingkan kekuatan-kekuatan dunia yang diyakini bertanggung-jawab atas penderitaan mereka, melalui strategi-

strategi teroris, Afghanistan dan Pakistan menjadi pusat-pusat penting globalisasi, *jihad* dan kultur jihad melalui jaringan madrasah dan kamp-kamp pelatihan. Taliban dan al-Qaeda menyediakan suaka dan pelatihan bagi para militan, seperti: Mesir, Aljazair, Yaman, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Filipina, Uzbekistan, Tajikistan, Chechnya dan Uighur dari Provinsi Xinjiang Cina.²¹

Jihad dalam pengertian para kelompok teroris menunjukkan bahwa kelompok muslim militan sepertinya “marah besar” terhadap Barat yang dianggap pemicu penindasan terhadap umat Islam di dunia. Meskipun tidak semua negara Barat yang bersikap anti terhadap Islam, namun, pengalaman pahit yang mereka saksikan penindasan terhadap muslim minoritas, membuat mereka men-*generalisir* penilaian negatif terhadap Barat. Mereka menganggap bahwa sebagai Sejarah koloni, penaklukan dan konfederasi telah melahirkan semangat patriotisme orang-orang Barat. Bahkan konstitusi tegas memencilkan komunitas muslim, yaitu pemerintah di Barat (sebagaimana di Perancis) tidak mengajarkan pendidikan Islam bagi anak-anak muslim. Sebaliknya, pemerintah membatasi kegiatan-kegiatan Islam dalam masyarakat, terutama karena dianggap berlawanan dengan prinsip sekularisme.²² Dalam konteks ini, mereka seharusnya mencontoh Indonesia, yang sering disebut sebagai *par excellence* tentang kerukunan hidup antar umat beragama. Meskipun, terkadang kerukunan yang telah terbentuk *dicoreng* oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab, sebagaimana yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 dan pembantaian etnis di Sampit Kalimantan pada tahun 2000. Namun, pemerintah Indonesia tidak

pernah mendeskreditkan agama tertentu. Semua penganut agama diberi hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, dan berhak memperoleh keadilan dan kesejahteraan di bumi Indonesia.

d. ***Daar al-Islam, Daar al-Harb dan Daar al-Da'wab***

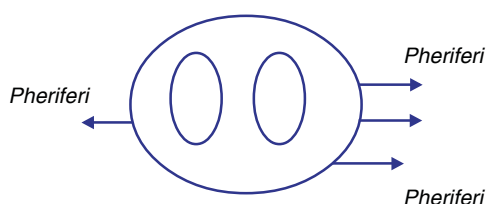
Ada dilema yang dihadapi muslim minoritas yang tertindas di daerah-daerah tertentu: Apakah *hijrah* ke wilayah lain, atau ber*jihad* agar bisa memperjuangkan hak-hak mereka. Pilihan *hijrah* sebagaimana yang telah di tulis di atas, bisa jadi bermasalah karena seringkali setiap masuknya sejumlah besar pengungsi menyebabkan timbulnya masalah sosial dan politik kepada masyarakat tuan rumah. Sedangkan pilihan *jihad* juga sulit dilakukan saat ini. Dalam hal kesulitan menentukan *hijrah* atau *jihad*, Kettani menawarkan model *hijrah* alternatif kepada minoritas muslim, yaitu: **Pertama**, model klasik Mekkah. Pada model ini minoritas muslim rentan terkena tekanan keamanan dan tak kenal henti dipaksa untuk memilih *hijrah* atau dalam keadaan perang dengan mayoritas. Untuk masa yang panjang, pilihan ini merupakan pemikiran mayoritas muslim tradisional yang ditanamkan dengan kelangsungan hidup yang eksklusif. **Kedua**, model *Abyssinia*. Jaminan masa depan hanya ada jika mereka hidup dalam kebersamaan dengan lainnya. Kettani menyebutnya sebagai keadaan yang penuh toleransi, adanya suasana damai dan pertukaran bangsa.²³

Agaknya sulit memilih kedua tawaran Kettani untuk kasus minoritas muslim di Filipina. Model minoritas muslim dalam kasus di Filipina, relatif berbeda dengan minoritas muslim di

wilayah lain. Perlawanan bangsa Moro melawan penjajah merupakan bentuk *jihad fi sabilillah*. Perjuangan menentang kolonialis adalah perlawanan untuk melindungi integritas territorial dan independensi, istilah ini mereka sebut dalam bahasa Arab *daar al-Islam (the Abode of Islam)*. Mereka ingin menegaskan bahwa Mindanao dan Sulu adalah wilayah Kekuasaan Melayu Muslim.²⁴ Jadi wilayah ini adalah hak muslim Filipina, tidak boleh diganggu gugat, dan mereka tidak ingin *hijrah*.

Sehubungan dengan permasalahan wilayah bagi minoritas muslim di Filipina tersebut, perlu dicermati pemikiran intelektual muslim yang berusaha mencari solusi bagi muslim minoritas, muslim Moro salah satunya. Salah satu rekomendasi kepada para muslim yang tinggal di negara non-muslim adalah agar mendefinisikan ulang tentang pengertian *daar al-Islam (the Abode of Islam)*. Sebagian ulama berpendapat bahwa konsep *daar al-Islam* merupakan tempat diterapkannya *syari'ah* dengan tepat. Sedangkan ulama lainnya membatasi bahwa *dar al-Islam* adalah tempat berkuasanya seorang penguasa muslim.²⁵ Tariq Ramadhan tidak setuju dengan pembagian *daar al-Islam (the Abode of Islam)* dan *daar al-harb (the Abode of War)*.²⁶ Tariq Ramadhan tidak sependapat dengan konsep ini dengan alasan bahwa dunia kontemporer sudah sedemikian kompleks sehingga permasalahan umat Islam tidak bisa disederhanakan begitu saja. Bahkan definisi tersebut memunculkan paradoks di negara yang disebut *daar al-Harb*. Ada komunitas muslim yang justru merasa lebih *enjoy* dan menikmati kebebasan mengekspresikan ajaran keberagamaannya di *daar al-harb* ketimbang di wilayah *daar*

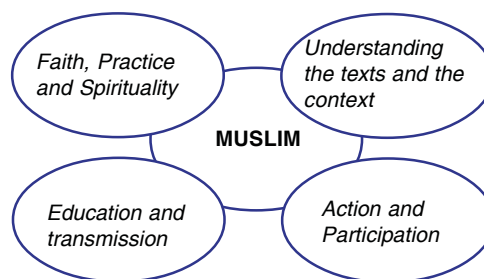
al-Islam.²⁷ Logika konflik yang diusung dalam gambaran dwipolar itu menjebak umat Islam dalam suatu cara berpikir yang tidak positif. Tariq menggambarkan sebagai berikut: “Barat bersama negara-negara yang dipengaruhinya saat ini adalah pusat dunia (*word center*), sedangkan yang lainnya adalah periferi.²⁸



Dengan cara pandang demikian, ketika seseorang hidup di dunia Barat (pusat), dia tidak harus mundur ke visi lama dua kutub dengan mencari musuh. Tetapi sebaliknya, dia harus mencari mitra untuk meningkatkan kontribusi positif terhadap dunia, menolak penyimpangannya yang merusak, meningkatkan kebajikan dan keadilan melalui persaudaraan manusia untuk semua manusia apa pun rasnya, agamanya dan bangsanya. Di Barat, umat Islam harus membuktikan kesaksian kebenaran yang mereka percayai. Dengan mempertimbangkan prinsip ini, Tariq memposisikan muslim di Barat dengan konsep *daar al-da'wah*. Konsep *Daar al-da'wah* mengacu kepada situasi ketika nabi berada di Makkah. Beliau hidup sebagai minoritas dan dituntut untuk mempersaksikan keyakinan agamanya kepada masyarakat kafir Makkah. Dalam hal ini, menurut Tariq, ada empat unsur pokok yang diperlihatkan oleh Nabi saw dan para sahabatnya dan kemudian menjadi bagian dari identitas seorang muslim, yaitu: iman dan spiritualitas

yang diyakininya, memahami kitab suci yang sesuai antara teks dan konteks, berpendidikan dan partisipasi aktif dalam masyarakat.²⁹ Muslim Moro mungkin bisa menggunakan strategi dengan konsep *daar al-da'wah* yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu memperlihatkan prinsip hidup seorang muslim tanpa harus menunjukkan permusuhan dan kekerasan. Oleh sebab itu, muslim moro mestinya menunjukkan identitasnya yang memiliki konsep utuh sebagai kelompok muslim.

Konsep Identitas Muslim sebagai berikut:



Skema di atas memperlihatkan gambaran konsep ideal identitas muslim. Islam tidak hanya terletak pada keyakinan (spiritualitas), tetapi sangat terkait dengan pemahaman ajaran Islam baik teks maupun konteks, pendidikan serta *action* (*'amal al-shaleh*). Islam tidak akan bermakna jika umat Islam hanya sibuk dengan urusan spiritualitas sementara pemahamannya terhadap teks dan konteks ayat al-Qur'an dan Hadis masih sangat kurang. Kedangkalan pemahaman terhadap teks ayat dan Hadis menyebabkan mereka sulit mentransmisi nilai-nilai pendidikan dalam Islam kepada sesama manusia, sehingga tidak seimbang antara *hambun*

min Allah dan *hamblun min an-naas*, atau bisa dikatakan umat Islam tidak maksimal berbuat dalam kancah kehidupan di era teknologi dan informasi dewasa ini.

Kasus minoritas muslim di Filipina mungkin berbeda dengan minoritas muslim di Mekkah zaman Nabi saw. Minoritas muslim di Filipina harus berjuang terus menerus memperlihatkan bagaimana kondisi yang tidak kondusif tersebut berakibat buruk bagi masyarakatnya sendiri. Kemiskinan kehidupan masyarakatnya memaksa mereka harus hidup seadanya, dan mengabaikan pendidikan. Pemimpinnya lebih terfokus pada memperkuat tentara dengan mempersenjatai mereka dengan senjata terkini. Latihan berperang terus menerus dilakukan sehingga suasana seperti siap untuk bertempur. Suasana seperti ini jauh dari konsep idealitas Muslim, terutama pada aspek pendidikan. Suasana yang siap siaga untuk berperang setiap saat membuat para petingginya tidak sempat memikirkan pendidikan untuk generasi muda mereka. Kondisi ini memaksa mereka untuk menerima hidup dalam lingkaran kemiskinan.

Minoritas Muslim di Filipina

Filipina merupakan negeri kepulauan yang terdiri dari 7.109 pulau tropis dengan luas total wilayah 29.629.00 hektare. Ibu Kotanya Manila. Terdiri dari beragam etnis, bahasa dan agama. Mayoritas beragama Katolik. Menurut catatan sensus resmi Filipina pada tahun 1990 jumlah kelompok muslim 5 % dari keseluruhan penduduk Filipina. Yakni sekitar 2,8 juta jiwa dari jumlah total populasi 65 juta penduduk.

Sementara itu, berbagai sumber lainnya menyebutkan bahwa sekarang ini setidaknya terdapat kurang lebih 7 juta penduduk muslim, artinya mencapai 10 % dari total penduduk Filipina. Jumlah itu cukup menjadikan komunitas muslim sebagai kelompok minoritas, baik dari segi budaya, maupun politik, di tengah-tengah bangsa Filipina yang mayoritas beragama Katolik. Mayoritas muslim Filipina bertempat tinggal di kawasan Filipina Selatan. Khususnya di Pulau Mindanao dan kepulauan Sulu.³⁰

Muslim Filipina juga sering disebut dengan nama bangsa Moro. Menurut sejarahnya, istilah “Moro” merujuk kepada kata “moor”, “moriscor”, atau muslim. Kata “moor” berasal dari istilah Latin “Mauri”-istilah yang sering digunakan orang Romawi Kuno untuk menyebut penduduk wilayah Aljazair Barat dan Marokko. Ketika Bangsa Spanyol tiba di Wilayah Filipina dan menemukan sebuah bangsa yang memiliki agama dan adat istiadat seperti orang-orang “Moor” di Spanyol Andalusia, kemudian mereka menyebut orang-orang Islam Filipina dengan istilah Moro.³¹ Sebutan Moro merupakan label bagi identitas nasional mereka. Ada tiga kelompok etnolinguistik Moro, yakni: kelompok Maguindanao-Iranun di wilayah Cotabato, kelompok Tausug Samal di Kepulauan Sulu dan kelompok Maranawa di derah Lanao.³² Namun, Peter G. Gowing memberi arti yang berbeda. Menurutnya sebutan “moor” merupakan *distigmatisasi* (julukan yang berkonotasi buruk), yang berarti buta huruf, jahat, tidak bertuhan dan pembunuh.³³

Penduduk muslim terkonsentrasi di lima provinsi Mindanao Barat, yakni: Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu dan Tawi-Tawi. Menurut sensus 1990, diperkirakan 19 % dari penduduk Mindanao adalah Muslim. Wilayah-wilayah muslim di Filipina terdaftar sebagai daerah miskin.

Indikator miskin dilihat dari pendidikan dan kesehatan penduduknya ternyata paling rendah di negara itu.³⁴ Islam masuk ke Filipina sekitar Abad ke-13 di Sulu Filipina Selatan. Sementara Spanyol datang sekitar abad ke-16. Islam berkembang melalui jalur perdagangan dan disebarkan oleh para da'i, yang dikenal dengan sebutan *Masya'ika*, Makhdumin, dan Auliya'.³⁵ Islam diperkenalkan ke Filipina pada tahun 1210 oleh para pedagang Arab dan penyebar Islam, 300 tahun sebelum masuknya Kristen Katolik ke Filipina melalui kolonialisme Spanyol pada tahun 1521. Pada kolonialisme Spanyol, Islam telah membentuk beberapa komunitasnya di wilayah pantai dari pulau-pulau besar di Filipina termasuk Manila.³⁶³⁷

Islam di Filipina berkembang hanya sampai pada pulau Mindanao. Kedatangan Bangsa Spanyol pada tahun 1565 (tahun 1521 menurut Jhon Gershman) ke Filipina untuk mendirikan koloni dengan nuansa Kristen yang kemudian berpengaruh dalam kehidupan sosial dan budaya Filipina secara langsung. Berbagai konflik antara kelompok Islam dan kolonial Spanyol tidak terhindarkan seperti yang terjadi di Sulu, Manguindanao dan Buayan, yang sering disebut dengan perang "Moro". Penyebab konflik bukan hanya disebabkan faktor ekonomi dan politik, melainkan juga berkaitan dengan persaingan pengaruh antar agama. Menurut Caesar Adib Majul ini merupakan rangkaian lanjutan dari Perang Salib di Eropa. Spanyol menerapkan sistem politik *divide and rule* (pecah belah dan kuasai) dan *mission sacre* (misi suci kristenisasi) terhadap umat Islam.

Pada tahun 1898 Spanyol mengalihkan kekuasaannya di Filipina kepada Amerika dengan harga 20 juta Dollar AS. Sejak itu Amerika mengambil alih kekuasaan di Filipina. Pada saat memperoleh kemerdekaan pada tahun 1946, kekuasaan beralih pula ke pemerintah

Filipina Utara.³⁸ Sebelum kekuasaan diserahkan kepada Filipina Utara, pada Bulan Agustus 1916 pemerintah Filipina mendapat hak legislatif untuk menguasai tanah Moro. Peristiwa ini sangat berpengaruh terhadap semakin dominannya peran bangsa non-muslim Filipina terhadap perkembangan Moro. Mereka membuka lahan pertanian dan mengeluarkan peraturan tentang pertanahan secara sepihak. Pada tahun 1919 pemerintah mengeluarkan ultimatum bahwa seluruh tanah di Filipina adalah milik negara. Dan pada tahun 1944 dibangun pemukiman secara besar-besaran di wilayah Mindanao, kemudian dibuat program migrasi dalam jumlah besar. Pemerintah yang menyiapkan infra struktur dan juga program subsidi.³⁹

Dengan kebijakan pemerintah Filipina Utara di atas, maka terbentuklah minoritas muslim di Filipina Selatan. Sikap pemerintah yang membatasi ruang gerak mereka dan memperlakukan mereka secara tidak adil, menyebabkan mereka tidak percaya dengan pemerintah Filipina Utara, dan mereka pun menolak berintegrasi. Menurut pengamat masalah keislaman Filipina, Peter G. Gawing dan Robert Day Mc Amis, bahwa muslim Filipina cenderung menjadi objek yang tidak dapat digerakkan, sementara nasionalisme Filipina juga cenderung kaku dan kekuatannya tidak dapat ditentang. Akibatnya, sering terjadi kesalahpahaman yang dilematis antara kelompok Islam dan berbagai komponen negara Filipina lainnya. Muslim Filipina merasa bahwa mereka memiliki hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan agama, tradisi dan sumber-sumber ekonomi mereka. Semua ini merupakan warisan yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Tokoh MNLF, Abhout Lingga, mengilustrasikan bahwa meskipun masyarakat Islam mendapatkan tempat dalam "rumah" di Filipina, namun mereka tidak mendapatkan perhatian, keamanan dan

kebahagiaan untuk menempati rumah tersebut.⁴⁰ Ada tiga organisasi Moro yang berjuang untuk memerdekakan diri (*self-determination*), yaitu: MNLF (*Moro National Liberation Front*), ada dua kelompok sebagai pecahan dari MNLF disebabkan konflik internal, yaitu: *Pertama*; MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), yang memisahkan diri dari MNLF tahun 1977, tetapi secara formal baru didirikan tahun 1984. *Kedua*: Abu Sayaf, didirikan pada tahun 1991.⁴¹

Konflik internal di dalam tubuh MNLF telah menyebabkan kelompok Misuari kehilangan posisi tawar mereka dengan pemerintah Filipina. Pemerintah Filipina tidak selalu mampu menangani situasi di Mindanao. Sebagai contoh, kebijakan deklarasi “Perang Total” yang dikumandangkan oleh Presiden Estrada pada bulan Mei 2000, sama sekali mengagalkan proses perdamaian. Pandangannya yang menyamaratakan bahwa semua umat Islam adalah musuh memperlihatkan pengetahuannya yang minim serta ketidakpekaannya tentang sejarah “pemberontakan” Bangsa Moro. Pada kenyataannya Moro merupakan komunitas tunggal, tetapi mereka memiliki budaya yang beragam.⁴² Faksi Angkatan Bersenjata Filipina juga merupakan salah satu kontributor bagi konflik bersenjata di Mindanao. Perundingan damai yang dilakukan hanya merupakan suatu keberhasilan yang temporer. Situasi yang lebih kritis adalah bagaimana menciptakan perdamaian setelah kesepakatan ditandatangani karena masing-masing pihak masih mempertahankan posisinya.⁴³ Menanggapi situasi ini, Bouzon mengidentifikasi konflik tersebut sebagai persoalan psikologis karena kedua kelompok agama memperlihatkan sikap intoleransi, kesalahpahaman, miskomunikasi dan tidak menghormati antara satu dengan lainnya. Kesenjangan psikologis yang tidak dapat diperbaiki ini akhirnya menghasilkan

kegagalan baru. Dalam kaitannya dengan sekularisme di Filipina, citranegara Katolik masih tertanam di antara negara-negara Asia lainnya, karena 80 % penduduk Filipina beragama Katolik. Konsekuensinya, persoalan itu dianggap sebagai kegagalan kelompok Katolik dalam menangani kelompok Muslim.⁴⁴

Selain konflik internal, perdamaian di Mindanao juga dipengaruhi oleh kesenjangan ekonomi, tidak hanya terjadi di Manila (kelompok kaya) tetapi juga diantara *tri-people* (masyarakat asli, penganut muslim, dan penganut Katolik) yang memilih pandangan berbeda dalam memahami proses politik dan ekonomi. Kecemburuan sosial yang disebabkan oleh akses terhadap pekerjaan pendidikan dan kesehatan juga jaminan sosial masyarakat Filipina Selatan merupakan faktor-faktor di balik kesenjangan tersebut. Penyelesaian pemberontakan Moro, dari yang paling tegas (Martial Law 1972) sampai dengan kesepakatan damai 1996 semuanya mengalami kegagalan. Menurut Jawali, “persoalan Mindanao merupakan persoalan ideologi yang berakar pada sejarah.”. Sedangkan menurut J.G. Bernas, “Mindanao bukan hanya merupakan persoalan hukum, melainkan juga persoalan budaya dan sejarah. Tidak akan pernah ada perdamaian diantara mereka setelah itu. Oleh karena itu, pembentukan negara Islam bagi bangsa Moro yang merdeka merupakan satu-satunya jalan untuk memperoleh perdamaian di Filipina.”⁴⁵ Menyimak pendapat Jawali dan Bernas, sejarah masa lalu merupakan akar konflik kedua agama di Filipina. Dengan demikian, akan sulit menyambung titik temu antara kedua agama yang tersebut. Solusi tawaran dari Bernas patut dipertimbangkan, jika ingin melihat perdamaian di Filipina.

Kebijakan pemerintah Filipina yang militeristik semakin mempertajam konflik,

sehingga tidak terwujudnya perdamaian. Hanya pada pemerintahan Ramos pernah terjadi perundingan damai. Fidel Ramos memberlakukan kebijakan yang tidak terlalu militeristik terhadap MNLF. Kesepakatan damai antara pemerintah dan MNLF pada tahun 1996 merupakan klimaks dari seluruh proses perundingan damai. Ramos disambut sebagai satu-satunya pemimpin yang secara serius berupaya untuk menyelenggarakan perundingan damai. Tetapi, ini pun tidak berlangsung lama, hanya sampai tahun 1999. Setelah Estrada menjadi presiden, militer kembali ke panggung kekuasaan, dan Estrada justru mengumumkan perang total kepada Moro. Sedangkan Presiden Arroyo mengambil posisi berbeda dengan cara mendominasi perundingan damai dengan para pemberontak, terutama karena ia pernah terlibat dalam proses perdamaian sebelum terjadi presiden.⁴⁶ Arroyo

menggunakan simbol-simbol perdamaian bagi gerakannya, yang digambarkan jauh dari aksi kekerasan. Tetapi, politik damai Arroyo sangat diskriminatif. Ia tidak bersedia melakukan dialog dengan kelompok Abu Sayyaf (ASG), tetapi bersedia bicara dengan MNLF (faksi Misiuari), serta melakukan operasi militer. ASG berbeda dengan MNLF atau MILF, tetapi sejauh berkaitan dengan keanggotaan di ASG, agak sulit untuk membedakan afiliasi mereka, jika mereka pernah menjadi anggota ASG, atau berpindah ke kelompok-kelompok lain, seperti perpindahan para pendukung Misuari ke MILF. Agaknya, mereka lebih mempercayai bahwa pendekatan militeristik lebih relevan untuk mempersatukan muslim Moro dan untuk kasus di Filipina. Kondisi ini bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Pemerintahan	Kebijakan/ Pendekatan		
1	Ferdinand Marcos	Militer	Politik	diplomasi
2	Corazon Aquino	Militer	Politik/referendum	
3	Fidel Ramos	Militer	Politik/perundingan damai	Diplomasi ekonomi
4	Joseph Estrada	Militer		
5	Gloria M. Arroyo	Militer	Politik/Perundingan damai	Diplomasi ekonomi

Sumber: Adriana Elisabeth dalam "Daerah Otonomi Muslim Mindanao": *Makalah* Regional Workshop

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa pada masa Aquino dilakukan pendekatan politik referendum. Namun, suasana politik yang sedemikian panas menyebabkan kemerdekaan Moro tidak sampai dideklarasikan. Meskipun sudah diupayakan pula melakukan perundingan damai pada masa Fidel Ramos dan Arroyo, tetap juga tidak berhasil menemukan titik temu.

Ketidakberhasilan tersebut dikarenakan sikap represif pemerintah pusat terhadap Bangsa Moro yang sedemikian kuat sebagaimana yang terjadi ketika Ferdinan Marcos berkuasa pada tahun 1965. Tekanan pemerintahan Marcos menyebabkan munculnya berbagai gerakan perjuangan bangsa Moro, seperti: Muslim Independent Movement (MIM) yang didirikan politisi muslim, Udtog Matalam, pada tahun 1968 dan Moro Liberation Front (MLF) pada tahun 1971. Karena perbedaan visi dan orientasi perjuangan, MLF yang tadinya diharapkan menjadi induk gerakan pembebasan Bangsa Moro akhirnya pecah. Dari sini muncul dua kelompok, yakni kelompok nasionalis-sekuler pimpinan Nur Misiuari yang mendirikan Moro National Liberation Front (MNLF) dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang dipimpin oleh Hashim Salamat. Dalam perjalanannya, MNLF pun akhirnya terpecah lagi dengan munculnya kelompok MNLF Reformis di bawah pimpinan Dimas Pundato (1981), dan kelompok Abu Sayyaf di bawah pimpinan Abdurrazak Janjalam (1993).⁴⁷ Jadi, ada tiga organisasi Moro yang berjuang untuk memerdekakan diri (*self-determination*), yaitu: MNLF (*Moro National Liberation Front*), dan dua kelompok sebagai pecahan dari MNLF, yaitu: *Pertama*; MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), yang memisahkan diri dari MNLF tahun 1977, tetapi secara formal baru didirikan tahun 1984. *Kedua*: Kelompok Abu Sayyaf, didirikan pada tahun 1991.⁴⁸

Profil Gerakan Islam di Filipina

1. *Moro National Liberation Front (MNLF)*: Dirikan pada tahun 1969. MNLF merekrut para anggotanya dari kelompok etnis Tausug, Samal dan Yakan. Anggota pertamanya adalah pemuda yang direkrut oleh tradisi kepemimpinan Islam untuk latihan militer di Malaysia. Seperti: Nur Misiuari, pemimpin MNLF. Mereka pada umumnya berlatar belakang pendidikan sekuler, dan beberapa orang diantaranya pernah terlibat dalam gerakan politik mahasiswa beraliran kiri. Ketika MNLF didirikan, tujuannya adalah untuk menciptakan independensi kampung halaman Bangsa Moro. MNLF sekarang ini bekerja dalam pemerintahan wilayah otonom Muslim Mindanao.
2. *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*. Secara resmi didirikan pada tahun 1984. Berawal dari sebuah kelompok yang dipimpin oleh anggota Komite sentral yaitu Salamat Hashim yang keluar dari MNLF tidak lama setelah gagal perjanjian Tripoli pada tahun 1977. MILF ini pada awalnya disebut MNLF baru, tapi kemudian tahun 1984 secara formal berganti nama dengan MILF. Berbeda dengan MNLF, MILF lebih menekankan pada persoalan-persoalan Islam, dan kebanyakan pemimpinnya adalah para sarjana Islam yang berlatar agama dan aristokrat tradisional. MILF mengakui memiliki 120.000 para pejuang bersenjata dan tidak bersenjata serta para simpatisannya. Pemerintahan Filipina saat ini memperkirakan kekuatan MILF sekitar 8000 orang. Sementara sumber intelijen Barat menduga sekitar 40.000 orang.
3. *Abu Sayyaf (Bearer of the Sword)*. Didirikan pada pertengahan tahun

1980-an. Abu Sayyaf bertujuan untuk menyebarkan Islam melalui Jihad. Pendirinya adalah Abdulrajak Abu Bakar Janjalani, seorang yang berpengalaman dalam kepemimpinan, adalah seorang sarjana Islam dan anggota MNLF. Dia terbunuh dalam bentrok dengan militer pada Bulan Desember 1998. Data akurat tentang besaran kelompok ini susah ditemukan. Menurut estimasi pemerintah Amerika, jumlah kelompok Abu Sayyaf adalah 200 orang. Militer Filipina memperkirakan lebih dari 1.000 gerilya dan 5.000 anggota. Pejabat militer Filipina mengatakan bahwa Abu Sayyaf menerima bantuan material dan finansial dan juga latihan militer dari jaringan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden sampai tahun 1995, dan dua kelompok ini selalu melakukan kontak.

4. *Organisation of the Islamic Conference* (OIC). Didirikan pada tahun 1969, organisasi antarnegara ini memiliki anggota dari 56 negara. Organisasi konferensi Islam ini telah menjadi penengah dalam negosiasi antara MNLF dan pemerintah Filipina sejak tahun 1970-an dan telah berperan dalam mengontrol pelaksanaan perjanjian damai tahun 1996. MNLF telah menjadi pengawas resmi OIC sejak tahun 1977. MILF gagal menjadi pengawas pada tahun 2000. Libya, Indonesia dan Malaysia adalah anggota OIC yang sangat aktif menjadi mediator antara pemerintah Filipina dan kelompok Moro.⁴⁹

Otonomi Khusus atau Merdeka Bagi Moro?

Tuntutan kemerdekaan Moro terfokus terutama pada mencapai otonomi yang sesungguhnya. Pada tingkat tertentu mereka

ingin membentuk negara merdeka. Solusi lain yang diajukan mereka dan didukung oleh kelompok non-muslim adalah negara federalis. Federalisme akan menghasilkan desentralisasi pemerintahan yang lebih luas dan reformasi yang lebih kuat. Tetapi, tidak ada kemajuan berarti dari tawaran ini.

Dalam jangka pendek, agenda kemerdekaan Moro nampaknya akan lebih menerima pemberian otonomi. Supaya otonomi berfungsi, maka diperlukan perhatian terhadap rendahnya sumber yang ada sebagaimana lemahnya basis infrastruktur wilayah itu. Secara historis, pemerintah Filipina telah merespon mobilisasi politik Moro dengan solusi militer. Jika ini dilakukan, nampaknya konflik akan terus berkelanjutan.

Permasalahan semakin sulit karena pembicaraan damai atau persetujuan damai tidak dapat memuaskan semua kelompok karena tuntutan politik mereka yang berbeda-beda. Karena perpecahan itu, pemerintahan di Malancanang cenderung untuk melakukan negosiasi hanya dengan kelompok yang dianggap solid pada waktu tertentu. Perundingan damai pada tahun 1992-1996 berlangsung antara pemerintah Filipina (GRP/*Government of the Republic of the Philippines*) dan MNLF. Tetapi, kubu MILF sangat tidak setuju karena MNLF dianggap tidak mewakili muslim secara keseluruhan di Filipina dan berpijak pada agenda politik yang berbeda. Kemerdekaan atau pemisahan merupakan keinginan MILF, sementara MNLF lebih menginginkan otonomi penuh. Pemerintah meyakini bahwa MILF dan Abu sayyaf memiliki keterkaitan.

Kondisi semakin tidak menentu dikarenakan kebijakan yang selalu berubah pada setiap pemerintah Filipina. Para pemimpin Filipina mengambil kebijakan berbeda dalam menghadapi Muslim Filipina.

Fidel Ramos tidak terlalu militeristik. Sedangkan Estrada sebaliknya, bahkan mengumandangkan “perang total”. Arroyo mengambil kebijakan berbeda, dengan cara mendominasi perundingan damai dengan para pemberontak, terutama karena ia pernah terlibat dalam proses perdamaian sebelum menjadi presiden. Ia menggunakan simbol-simbol perdamaian dalam gerakannya, yang digambarkan jauh dari aksi kekerasan. Tetapi, politik damai yang ditawarkan Arroyo dinilai sangat diskriminatif. Ia tidak bersedia melakukan dialog dengan kelompok Abu Sayyaf, tetapi bersedia bicara dengan MNLF (faksi Misuari).

Dari uraian di atas terlihat bahwa secara umum, kebangkitan Islam di Filipina berkembang dalam dua paradigma: **Pertama**, paradigma radikal yang dikembangkan oleh aktivis MNLF, yang semula merupakan kelompok minoritas di kalangan Islam. MNLF pernah melahirkan manifesto yang menyerukan kemerdekaan bagi bangsa Moro. **Kedua**, pandangan moderat yang didukung oleh banyak kelompok Islam yang menginginkan adanya berbagai perubahan sosial dalam konteks lebih luas.

Kesimpulan

Perjuangan minoritas muslim sesungguhnya memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan dalam kehidupan ini. Konflik yang dominan terjadi adalah konflik agama. Oleh sebab itu, memang sudah seharusnya para penganut agama menyatukan pandangan dengan membentuk *world view* dalam agama, bahwa agama tidak mengajarkan kekerasan dan tidak menginsturuksikan menganiaya penganut agama lain. Dunia lama telah berganti dengan realitas-realitas baru, dan cara berpikir orang-orang Yahudi-Kristen juga

perlu diperluas untuk mengakui tradisi bersama Yahudi-Kristen-Islam. Agama Yahudi dan Kristen berawal dari Timur Tengah, tetapi menyebar ke seluruh dunia. Saat ini kedua agama tersebut seringkali diidentikkan dengan agama Barat, bukannya agama Timur, padahal tanah sucinya tetap dari dulu sampai sekarang, yaitu Palestina. Islam, dilain pihak disamping kehadirannya yang tidak bisa disepelkan di Barat, terus diidentikkan dengan dunia non-Barat. Masih terdapat kecenderungan dalam buku-buku dasar dan perkuliahan untuk mengelompokkan Islam dengan agama-agama Timur atau non-Barat, seperti: Hindu, Budha, Tao, bukannya dengan Yahudi dan kristen atau agama Ibrahim yang lain. Ini menyebabkan agama-seperti terpisah, dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri.

Ada banyak faktor sosiologis–kultural yang menyebabkan konflik antara mayoritas dengan minoritas. Banyak analisis yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, problem riil yang paling menonjol dan menjadi penyebab utama peristiwa konflik, kerusuhan dan kekerasan antara suku dan pemeluk agama, sebagaimana yang dipercaya banyak pihak, seringkali adalah karena kemiskinan yang dilahirkan dari perlakuan yang tidak adil memunculkan kesenjangan ekonomi dan friksi sosial yang tajam. Faktor-faktor ini telah menanamkan rasa dendam politik kaum minoritas kepada kaum mayoritas yang bertindak semena-mena.

Kasus muslim Moro Philipina, merupakan persoalan ideologi yang berakar pada sejarah. Keberadaan minoritas Muslim Moro di Filipina tidak sama dengan Muslim di Afrika, di Australia, di Amerika dan di Bosnia Herzegovina. Latar belakang sejarah yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda pula. Namun, perlu dikritisi, apakah dengan pembentukan negara Islam bagi bangsa Moro yang merdeka merupakan

satu-satunya solusi untuk memperoleh perdamaian di Filipina? Sementara itu, terdapat perpecahan dalam organisasi muslim Filipina, seperti MNLF, MILF, dan Abu Sayyaf. Perbedaan agenda visi dan misi dari masing-masingnya tidak menutup kemungkinan akan muncul masalah baru bagi sesama muslim di Filipina Selatan. Lalu bagaimana solusinya? Tawaran Thariq Ramadhan membentuk *daar al-da'wah* bagi minoritas muslim perlu dipertimbangkan kalau ingin ada perubahan. Masalah politik di Filipina memang sangat *pelik!* Sampai hari ini situasi dan kondisi konflik di Filipina masih mencekam dan menegangkan. Tidak banyak wartawan media, akademisi dan peneliti yang mau terjun langsung ke wilayah konflik di Filipina, karena nyawa menjadi taruhannya...!

Endnotes

¹ Robert W. Hefner, Islam dalam Era "Nation-State": Politik dan pembaruan Islam Asia Tenggara, dalam buku Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam, editor: Moeflich Hasbullah, (Bandung: Fokusmedia, 2003), hal. 80. Dalam bukunya History of Islamic Society, Ira M. Lapidus mengungkapkan salah satu karakteristik yang paling sembarangan dalam masalah ini dengan mengatakan bahwa "hampir selama 5000 tahun, wilayah Timur Tengah dan masyarakat Islam mendasarkan dirinya pada konstelasi turunan, kesukuan, agama dan institusi politik pertama terbukti dalam kota-kota kuno Mesopotamia pada milenium ketiga sebelum masehi. Ini adalah pandangan kultural yang menunjukkan keunggulan yang tidak kualified (unqualified primacy) terhadap preseden sejarah ketimbang terhadap rekreasi tradisi dalam cara-cara secara kontestual yang diperbarui. Sebagaimana John Bowen mengungkapkan, imajinasi Lapidus "menjadi sangat usang pada saat penulisnya membahas masyarakat Asia Tenggara Modern. Bahkan pengamat sehebat Oliver Roy pun tidak luput dari kekeliruan esensialisme geografis yang istimewa ini. Dalam tulisannya, The Failure of Political Islam,

dia mengamati bahwa dunia Islam terbagi atas "tiga wilayah geografis dan kultural, yakni Timur Tengah Arab-Sunni, Anak benua India-Sunni, dan Arab-Iran Shi'it".

- ² Robert W. Hefner, Islam dalam Era "Nation-State": Politik dan pembaruan Islam Asia Tenggara, dalam buku Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam, editor: Moeflich Hasbullah, (Bandung: Fokusmedia, 2003), hal. 75
- ³ Azyumardi Azra, Kebangkitan Islam akan Muncul dari Melayu, dalam buku Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam, editor: Moeflich Hasbullah, (Bandung: Fokusmedia, 2003), hal. 114
- ⁴ Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam, (Oxford Press, 2001), hal. 117-144
- ⁵ John L. Esposito, Islam The Straight Path, terj. Arif Maftuhin, Islam Warna-warni: Ragam Ekspresi Menuju "jalan lurus", (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 251
- ⁶ M. Ali Kettani, Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini, terj. Zarkowie soejoeti, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. xvii
- ⁷ Ibid, hal. V
- ⁸ Bandingkan dengan M. Arnold Rose and B. Carroline Rose, *Minoritas Problems*, New York: Herper and Row, 1972
- ⁹ M. Ali Kettani, *Loc. Cit.*
- ¹⁰ Ibid, hal. xviii
- ¹¹ Ibid, hal. 253
- ¹² Ibid, hal. 245
- ¹³ Ibid.
- ¹⁴ Allen Buchanan & Margareth Moore (ads.), *State, Nations, and Borders*, Cambridge University Press, 2003), hal. 231
- ¹⁵ Ketidakpastian hak-hak minoritas nasional dibahas dalam Dankwart A. Rustow, *Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model*, "Comparative politics", 2, 1970, hal. 337-364
- ¹⁶ Ibid.
- ¹⁷ Tariq Ramadan, *Western Muslim, Loc. Cit*
- ¹⁸ Eropa adalah kawasan yang telah memberi contoh paling buruk tentang pembantaian terhadap ras minoritas Yahudi. Melalui *holocaust*, yakni pemusnahan/pembunuhan massal dengan menggunakan gas beracun dalam satu ruangan besar tertutup. 4-6 juta Yahudi merengas nyawa. *Holocaust* ini bagi pemerintah Jerman merupakan "the final solution". Kasus yang sama juga terjadi Bosnia. Tentara Serbia pimpinan Slobodan Milosevic melakukan proyek pembersihan etnis terencana terhadap sipil minoritas muslim Bosnia. Dengan menggunakan cara-cara yang paling biadab dan barbar yang dikenal dalam sejarah

- kemanusiaan, dengan cara perkosaan massal yang diprogramkan (*programmed mass rape*). Tentara Serbia “membersihkan” Muslim Bosnia karena perbedaan etnis dan kecurigaan agama. (baca: Moeflich Hasbullah, ed. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2003, hal. 20)
- ¹⁹ Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI), hal. 3
- ²⁰ Mochtar Pabottinggi, *et.al., Potret Politik Kaum Muslim di Perancis dan Kanada*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 94
- ²¹ John L. Esposito, *Un Holy War*, terj. Syafruddin Hasani, *Teror Atas Nama Islam*, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003, hal. 144
- ²² *Ibid.*
- ²³ M.Ali Kettani, *Op. Cit.*, hal. xvii
- ²⁴ Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 5, *Minoritas Muslim Asia Tenggara*, (Jakarta: PT. Ikrarmandiriabadi, 2002), hal. 476
- ²⁵ Kholed Abu Fadl, *Islam Tantangan Demokrasi*, terj. (Jakarta: Ufuk Press, 2004), hal. 165
- ²⁶ Yang dimaksud dengan *daar al-Islam* adalah wilayah geografis tempat diberlakukannya hukum Islam dan di bawah naungan pemerintahan muslim. Sedangkan *daar al-Harb* adalah wilayah sistem pemerintahan yang tidak islami. (Tariq Ramadhan, *Western Muslims and The Future of Islam*, (New York: Oxford Press, 2001, hal. 65)
- ²⁷ *Ibid.*
- ²⁸ *Ibid.*, hal. 77
- ²⁹ *Ibid.*, hal. 85
- ³⁰ Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 5, *Minoritas Muslim Asia Tenggara*, (Jakarta: PT. Ikrarmandiriabadi, 2002), *Loc. Cit*
- ³¹ *Ibid.*
- ³² Jhon Gershman, *Peta dan Prospek Gerakan Islam di Filipina*, hal. 238
- ³³ Peter G. Gowing, *Muslim Filipina: Heritage and Horizon*, (Quezon City: New Day Publication, 1984), hal. 187-188
- ³⁴ Jhon Gershman, *Loc. Cit*
- ³⁵ *Ibid.*, hal. 477
- ³⁶ *Ibid.*
- ³⁷ *Ibid.*
- ³⁸ Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 5, *Loc. Cit.*
- ³⁹ *Ibid.*, hal. 478
- ⁴⁰ *Ibid.*
- ⁴¹ Jhon Gershman, *Loc. cit*
- ⁴² Melvin Mednick, “Some Problems of Moro History and Political Organization”, dalam Peter G. Gowing & Robert D. McAmis (ed.) *The Muslim Filipinos, Their History, Society and Contemporary Problems* (Manila: Solidaridad Publishing House, 1974), hal. 16. Dalam Adriana Elisabeth, “Daerah Otonomi Muslim Mindanao: Dinamika, Tantangan dan Prospek”, *Gerakan Militan Islam*, (Jakarta: The Ridep Institute, 2003, hal. 173
- ⁴³ *Ibid.*
- ⁴⁴ *Ibid.*, 176
- ⁴⁵ *Ibid.*
- ⁴⁶ Menurut Kepala Uskup Capalla, Presiden Arroyo telah menyetujui gencatan senjata di Mindanao dan kembali kepada dialog perdamaian yang melibatkan seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah, pemimpin-pemimpin agama Islam, Katolik, MNLF< MILF dan NPA.
- ⁴⁷ *Ibid.*
- ⁴⁸ *Jhon Gershman, Loc. Cit*
- ⁴⁹ *Ibid.*, hal. 242

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin dalam pengantar: Dialektika Agama antara Profanitas dan Sakralitas, dalam Moh. Shofan, *Jalan ketiga Pemikiran Islam*, Yogyakarta: IRCioD, 2006)
- Azra, Azyumardi, *Kebangkitan Islam akan Muncul dari melayu*, dalam buku *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, editor: Moeflich Hasbullah, Bandung: Fokusmedia, 2003
- Esposito, L., John, *Un Holy War*, terj. Syafruddin Hasani, *Teror Atas Nama Islam*, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003
- Esposito, L., John, *Islam The Straight Path*, terj. Arif Maftuhin, *Islam Warna-warni: Ragam Ekspresi Menuju "jalan lurus"*, (Jakarta: Paramadina, 2004
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 5, *Minoritas Muslim Asia Tenggara*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Fadl, Abu, Kholed, *Islam Tantangan Demokrasi*, terj. (Jakarta: Ufuk Press, 2004),
- Gowing, Peter G. *Muslim Filipina: Heritage and Horizon*, (Quezon City: New Day Publication, 1984
- Hefner, W., Robert, , *Islam dalam Era "Nation-State": Politik dan pembaruan Islam Asia Tenggara*, dalam buku *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, editor: Moeflich Hasbullah, Bandung: Fokusmedia, 2003
- Hidayat Komaruddin dan ahmad Gaus AF, pengantar Editor dalam, *Islam Negara dan Civil Society:Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005
- Kettani, Ali, M ., *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*, terj. Zarkowie soejoeti, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005,
- Kymlicka, Will *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI
- Mednick, Melvin ,”*Some Problems of Moro History and Political Organization*”, dalam Peter G. Growing & Robert D. McAmis (ed.) *The Muslim Filipinos, Their History, Society and Contemporary Problems* (Manila: Solidaridad Publishing House, 1974), hal. 16. Dalam Adriana Elisabeth, “Daerah Otonomi Muslim Mindanao: Dinamika, Tantangan dan Prospek”, *Gerakan Militan Islam*, (Jakarta: The Ridep Institute, 2003
- Pabottinggi, Mochtar, *et.al.*, *Potret Politik Kaum Muslim di Perancis dan Kanada*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Rabi, Abu- M., Ibrahim, *Intellectual Origins Resurgence in Modern Arab World*, New York: State University of New York Press, 1996
- Ramadhan, Tariq, *Western Muslims and the Future of Islam*, Oxford Press, 2001
- TV ONE, *Zona Merah*, tanggal 11 Nopemberr 2009
- Hidayat Komaruddin dan ahmad Gaus AF, pengantar Editor dalam, *Islam Negara dan Civil Society:Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005

Tentang Penulis

Rina Rehayati, Dosen tetap pada Fakultas Ushuluddin, menyelesaikan studi S1 di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pendidikan S2 di IAIN Susqa Pekanbaru dan sekarang sedang melanjutkan stuidi S3 di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.